

ABSTRAK

Jasa Konstruksi adalah salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis di tatanan ekonomi suatu negara berkembang karena menggunakan biaya konstruksi yang cukup besar dan berputar serta terdistribusikan kepada berbagai pihak yang mengakibatkan adanya perputaran keuangan dalam perekonomian bagi masyarakat. jasa konstruksi baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dimana ditemukan berbagai hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya kecurangan dalam proses tender pekerjaan di bidang konstruksi maupun jasa dan pengadaan lainnya. Permasalahannya bagaimana implementasi peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia dihubungkan dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan bagaimana kepastian hukum dalam proses tender pengadaan barang dan jasa konstruksi pemerintah berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia. Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normative, Kesimpulannya Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yaitu Pertama, Persiapan pengadaan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk kontrak yang harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran dan Asas kepastian hukum dalam kontrak konstruksi dapat tercipta apabila para pihak dalam hubungan kontraktual memahami dengan benar beberapa hal yang dapat menjamin kepastian hukum dalam kontrak konstruksi, yaitu pertama, prinsip-prinsip hukum dalam kontrak konstruksi dan kedua terminasi kontrak konstruksi.

Kata Kunci: Tender, Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah

ABSTRACT

Construction Services is one sector that has a very strategic role in the economic order of a developing country because it uses a fairly large construction cost and rotates and is distributed to various parties which results in a financial cycle in the economy for the community. construction services, both directly and indirectly related, where various things were found that did not work as they should, fraud in the tender process for work in the construction sector as well as other services and procurements. The problem is how the implementation of the ministerial regulation of public works and public housing number 14 of 2020 concerning standards and guidelines for the procurement of construction goods and services through providers is linked to presidential regulation number 16 of 2018 concerning the procurement of government goods and services and how is legal certainty in the tender process for the procurement of goods and services. government construction based on the regulation of the minister of public works and public housing number 14 of 2020 concerning standards and guidelines for the procurement of construction goods and services through providers. The research method used is a normative juridical approach, In conclusion, the implementation of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 14 of 2020 concerning Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Goods and Services through Providers is linked to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods and Services, namely First, Preparation of procurement after the RKA-K/L is approved by the DPR or the Regional Apparatus RKA approved by the DPRD. For contracts that must be signed at the beginning of the year, preparation for procurement or selection of providers can be carried out after the determination of the Budget Ceiling and the principle of legal certainty in a construction contract can be created if the parties in the contractual relationship correctly understand several things that can guarantee legal certainty in a construction contract, namely first, legal principles in construction contracts and secondly termination of construction contracts.

Keywords: *Tender, Procurement of Goods, Government Services*